Jurnal Interelasi Vol. 1 No.4 Juli 2025
Halaman 264-275. ISSN: p: 3090-952x, e:3090-2533

# EVALUASI KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SLAWU, KABUPATEN JEMBER

## *EVALUATION OF SOCIAL ASSISTANCE POLICY IN IMPROVING COMMUNITY WELFARE IN SLAWU VILLAGE, JEMBER REGENCY*

**Agus Budi Herlambang[1], Itok Wicaksono[2]**
[1]Universitas Muhammadiyah Jember, [2]Universitas Muhammadiyah Jember
[1]Ilmu Pemerintahan, [2]Ilmu Pemerintahan
e-mail: herlambang7120@gmail.com
itokwicaksono@unmuhjember.ac.id

**ABSTRAK**

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan, salah satunya adalah bantuan sosial (bansos). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan bansos dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Slawu, Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pihak pemerintah, pendamping program, serta penerima bantuan. Berdasarkan hasil temuan analisis berupa Kebutuhan yang mendesak, non diskriminasi, kesetaraan, pemberdayaan masyarakat melalui aspek keberlanjutan bansos, ketersediaan dana jangka panjang dalam bansos, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pengurangan kemisikinan dan kesenjangan sosial, potensi inflasi, dan ketergantungan pada bantuan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan sosial di Kelurahan Slawu memiliki dampak positif dalam membantu kelompok rentan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Namun, terdapat kendala dalam pendataan penerima bantuan yang belum sepenuhnya akurat, sehingga masih ada masyarakat yang membutuhkan tetapi belum terdaftar sebagai penerima. Selain itu, evaluasi juga menemukan bahwa bantuan sosial masih bersifat sementara dan belum sepenuhnya mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat penerima.

**Kata kunci:** Evaluasi Kebijakan; Bantuan Sosial; Kesejahteraan Masyarakat; Kelurahan Slawu; Kabupaten Jember.

***ABSTRACT***

*The government has a responsibility to improve people's welfare through various policies, one of which is social assistance (bansos). This study aims to evaluate the effectiveness of social assistance policies in improving people's welfare in Slawu Village, Jember Regency. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Data were obtained through interviews, observations, and documentation involving government officials, program assistants, and aid recipients. Based on the findings of the analysis in the form of Urgent needs, non-discrimination, equality, community empowerment through aspects of social assistance sustainability, availability of long-term funds in social assistance, community involvement in planning, poverty reduction and social inequality, potential inflation, and dependence on social assistance. The results of the study indicate that social assistance in Slawu Village has a positive impact in helping vulnerable groups meet their basic needs. However, there are obstacles in the data collection of aid recipients that are not yet fully accurate, so that there are still people who need it but have not been registered as recipients. In addition, the evaluation also found that social assistance is still temporary and has not been fully able to increase the economic independence of the recipient community.*

Jurnal Interelasi Vol. 1 No.4 Juli 2025
Halaman 264-275. ISSN: p: 3090-952x, e:3090-2533

***Keyword:****Policy Evaluation; Social Assistance; Community Welfare; Slawu Village; Jember Regency.*

## PENDAHULUAN

Salah satu tugas utama pemerintah dalam melaksanakan pembangunan negara dan memberikan pelayanan terbaik adalah dengan merumuskan kebijakan yang memiliki tujuan guna mensejahterakan masyarakat. Dalam konteks bansos, kebijakan menjadi alat penting untuk mengatasi permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketimpangan, dan dampak dari krisis ekonomi(I Wayan Tagel Winarta, 2020). Bantuan sosial (Bansos) adalah bentuk dukungan yang diberikan kepada masyarakat untuk memberikan perlindungan dari potensi risiko sosial serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Bantuan ini dapat berupa uang atau barang dan dapat disalurkan secara langsung kepada masyarakat, pemerintah daerah, atau melalui perangkat desa (Fadhli et al., 2021). Jadi, upaya pemerintah untuk menjamin kesejahteraan masyarakat terutama kelompok yang rentan terhadap kemiskinan dan ketidakadilan sosial diperlukan untuk memberikan perlindungan sosial, mengurangi dampak kemiskinan, dan memastikan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan.

Program bansos implementasi dari Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 34 ayat (1), yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin(Samsudin, 2022). Hal ini juga dimuat dalam (Santoso & Rahmawati, 2022) Peraturan Menteri Sosial Republic Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Penyaluran bantuan sosial. Dalam konteks ini, bansos mencakup berbagai bentuk bantuan, baik berupa uang maupun barang, yang diberikan secara selektif kepada masyarakat yang membutuhkan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 81/PMK.05/2012 mengatur mengenai belanja bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah pusat dan daerah kepada masyarakat (Sean Anggiatheda Sitorus, 2024).

Pemberian bantuan sosial didasarkan pada situasi dan kondisi yang ada, serta proposal yang diajukan oleh pihak-pihak yang membutuhkan dan telah disetujui oleh pemerintah(Bethesda et al., 2014). Artinya, bantuan hanya akan diberikan sesuai dengan kebutuhan yang muncul pada waktu tertentu dan bukan sebagai kewajiban tahunan. Bantuan sosial ini, yang sering kali diberikan dalam bentuk uang tunai, sembako, atau program pemberdayaan ekonomi, disalurkan berdasarkan keputusan yang diambil setelah melalui mekanisme administrasi yang jelas. Program-program bantuan sosial bertujuan untuk memastikan bantuan yang diberikan sasaran nya tepat dalam mengurangi dampak sosial serta meningkatkan taraf hidup masyarakat yang membutuhkan. Program ini memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial dan membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, serta memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak oleh berbagai faktor. Pengelolaan bansos dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan berbagai lembaga terkait, di mana data penerima bantuan biasanya diambil dari sensus penduduk miskin yang dilakukan secara berkala untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Bantuan sosial di Kabupaten Jember menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah dalam menghadapi permasalahan kemiskinan dan ketimpangan sosial yang kompleks.Salah satunya permasalahan di Jember yaitu memiliki populasi yang mayoritasnya bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan. Namun, ketergantungan ini membuat masyarakat rentan terhadap perubahan cuaca, fluktuasi harga komoditas, dan kondisi ekonomi global. Oleh karena itu, bansos menjadi solusi penting untuk menjaga stabilitas sosial dan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok.

Program- program bantuan sosial di kabupaten jember yakni Program Keluarga Harapan (PKH), yang menyasar keluarga miskin dengan kriteria tertentu seperti ibu hamil, anak sekolah, penyandang disabilitas, dan lansia. Dana PKH disalurkan langsung ke rekening peserta melalui bank mitra untuk memastikan transparansi dan ketepatan sasaran. Program Keluarga Harapan (PKH) juga berjalan dengan baik di Jember. Program ini memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin yang memiliki anggota keluarga

tertentu, seperti ibu hamil, anak sekolah, atau lansia(Zakiyah, 2017). Dengan syarat yang melibatkan pendidikan dan kesehatan, PKH tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga mendorong masyarakat miskin untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan anak-anak mereka dan kesehatan keluarga. Selain itu, program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), yang sekarang dikenal sebagai Kartu Sembako, bertujuan memberikan akses kepada masyarakat miskin untuk memperoleh bahan pangan pokok melalui jaringan e-Warong yang tersebar di berbagai wilayah. Bantuan ini membantu pemenuhan kebutuhan dasar dengan mekanisme yang terintegrasi secara elektronik Selain itu, program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) juga menjadi prioritas. Melalui program ini, masyarakat menerima kartu elektronik yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras dan telur di warung yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Program ini dirancang untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan sekaligus mendukung usaha kecil lokal melalui warung-warung yang dilibatkan dalam distribusi bantuan.

Kementerian Sosial juga meluncurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) selama pandemi COVID-19 untuk memberikan bantuan langsung berupa uang tunai kepada keluarga terdampak. Meski sempat menemui kendala teknis di beberapa lokasi, termasuk Jember. Program ini menjadi salah satu bentuk respons cepat pemerintah terhadap dampak ekonomi pandemi. Selain itu, program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) memberikan dukungan kepada kelompok rentan seperti anak yatim/piatu, penyandang disabilitas, dan lansia. Di Jember, program ini juga melibatkan Balai Rehabilitasi Sosial untuk mendata dan menampung anak yatim yang tidak memiliki pengasuh(Zakiyah, 2017). Dengan berbagai program tersebut, Kementerian Sosial terus berupaya memastikan bahwa bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sekaligus meningkatkan akurasi data dan efisiensi penyaluran bantuan. Di samping itu, Jember juga menghadapi risiko bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan, yang sering kali memperburuk kondisi masyarakat miskin. Untuk itu, pemerintah daerah menyediakan bantuan sosial darurat berupa barang kebutuhan pokok, uang tunai, hingga bantuan tempat tinggal sementara bagi korban bencana. Bantuan ini bersifat langsung dan bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak. Kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan lansia juga menjadi perhatian dalam program bansos di Jember.

Di Kabupaten jember pada tahun 2023, menerima berbagai jenis bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Bantuan ini mencakup beberapa program penting, termasuk Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diberikan kepada 19.177 penerima. Setiap penerima BST menerima bantuan uang tunai sebesar Rp400.000, yang diharapkan dapat membantu mereka yang terdampak kesulitan ekonomi. Selain itu, Kabupaten Jember juga mendapatkan bantuan berupa Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako, yang memberikan bantuan senilai Rp200.000 untuk membeli bahan pangan pokok. Bantuan ini menjangkau sebanyak 84.687 penerima di seluruh wilayah Jember. Program lainnya adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang juga memberikan bantuan senilai Rp200.000 kepada 13.882 penerima untuk pembelian sembako, guna memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selain bantuan dari pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Jember juga menyediakan bantuan sosial untuk kelompok masyarakat tertentu melalui dana APBD.

Pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dirancang untuk menciptakan tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Ketentuan ini berlaku secara menyeluruh bagi seluruh pemerintah daerah tanpa pengecualian (Huda 2019).Kelompok yang mendapat prioritas bantuan antara lain lansia, penyandang disabilitas berat, buruh tani, tenaga kerja yang terkena PHK, pedagang kecil (PKL), serta guru ngaji dan takmir masjid. Pembaruan data penerima bantuan ini terus dilakukan, dan masyarakat dapat mengakses informasi serta mengajukan diri untuk mendapatkan bantuan melalui platform Radar Bansos Kabupaten Jember, yang memfasilitasi partisipasi warga dalam pengajuan bantuan sosial. Dalam platform ini, masyarakat juga bisa melaporkan data yang tidak akurat atau mengajukan permohonan bantuan bagi mereka

yang belum menerima. Melalui proses verifikasi dan validasi yang ketat, bantuan sosial diharapkan dapat lebih tepat sasaran, meningkatkan kesejahteraan, dan membantu pemulihan ekonomi masyarakat Jember.

Penyaluran Bantuan sosial yaitu bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Slawu, Kabupaten Jember, dilaksanakan dengan tujuan membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak. Dari total 111 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar, sebanyak 94 KPM telah menerima bantuan dengan lancar. Namun, terdapat 17 KPM yang belum dapat menerima BLT karena menghadapi beberapa kendala teknis di lapangan. Salah satu kendala yang dihadapi adalah adanya KPM yang telah meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris yang tercatat dalam satu Kartu Keluarga (KK). Selain itu, ada juga KPM yang telah pindah alamat ke lokasi lain dan tidak dapat ditemukan, sehingga bantuan tidak bisa disalurkan sesuai prosedur.

Proses penyaluran Bantuan sosial ini berlangsung dengan dukungan dari berbagai pihak yang terlibat aktif dalam pelaksanaannya. Pegawai kelurahan memainkan peran penting dalam mengoordinasikan kegiatan di tingkat lokal, sementara pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) membantu memastikan kelengkapan data penerima. Selain itu, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) turut berkontribusi dalam mendampingi proses penyaluran agar berjalan sesuai aturan yang berlaku. Kegiatan ini mencerminkan kerja sama dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendistribusikan bantuan sosial secara tepat sasaran. Meskipun demikian, adanya kendala dalam penyaluran menandakan perlunya evaluasi dan peningkatan dalam pengelolaan data penerima bantuan, termasuk mekanisme untuk mengantisipasi masalah seperti perpindahan alamat atau tidak adanya ahli waris. Dengan evaluasi yang komprehensif dan upaya perbaikan, diharapkan program bantuan sosial ke depannya dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang evaluasi kebijakan bantuan sosial di Kelurahan Slawu, Kabupaten Jember, dengan fokus pada efektivitas, kendala, serta rekomendasi untuk perbaikan program. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan strategi yang lebih baik dalam penyelenggaraan bansos sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat yang dibutuhkan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas berwenang untuk menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, atau politik demi kepentingan umum. Kebijakan ini dirancang untuk mengatur kehidupan masyarakat dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kesejahteraan. Ciri-cirinya meliputi pembuatan oleh pemerintah atau lembaga berwenang, tujuan untuk kepentingan umum, pengaturan kehidupan masyarakat, tujuan yang jelas (seperti mengurangi kemiskinan atau meningkatkan pendidikan), dan proses sistematis yang meliputi identifikasi masalah, perumusan, implementasi, dan evaluasi.

Kebijakan publik dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, yakni: Kebijakan Regulatif artinya Kebijakan yang bertujuan untuk mengatur atau membatasi perilaku masyarakat, seperti hukum, peraturan, atau undang-undang yang mengatur aktivitas tertentu (misalnya peraturan lalu lintas atau pajak). Kebijakan Distributif artinya Kebijakan yang berkaitan dengan distribusi sumber daya atau manfaat publik, seperti alokasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur. Kebijakan Redistributif artinya Kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial atau ekonomi dengan cara mentransfer sumber daya dari kelompok yang lebih kaya kepada kelompok yang lebih miskin (misalnya program bantuan sosial). Kebijakan Afirmasi artinya Kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok tertentu yang terpinggirkan atau kurang beruntung dalam masyarakat, seperti kebijakan afirmatif

untuk perempuan atau minoritas. Kebijakan Laissez-faire artinya Kebijakan yang memberi kebebasan kepada pasar atau individu untuk beroperasi tanpa banyak campur tangan pemerintah, misalnya kebijakan ekonomi pasar bebas.

Kebijakan publik dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan tujuannya. Pertama, kebijakan regulatif bertujuan mengatur perilaku masyarakat, seperti peraturan lalu lintas. Kedua, kebijakan distributif berkaitan dengan pembagian sumber daya, seperti anggaran untuk pendidikan atau kesehatan. Ketiga, kebijakan redistributif bertujuan mengurangi ketimpangan sosial atau ekonomi, misalnya melalui program bantuan sosial. Keempat, kebijakan afirmasi dirancang untuk membantu kelompok terpinggirkan, seperti minoritas atau perempuan. Kelima, kebijakan laissez-faire memberikan kebebasan kepada pasar dengan sedikit intervensi pemerintah, seperti dalam ekonomi pasar bebas.

Proses pembuatan kebijakan publik melibatkan beberapa tahapan menurut Anderson. Pertama, agenda kebijakan, yaitu identifikasi masalah yang memerlukan perhatian pemerintah. Kedua, perumusan kebijakan, di mana solusi alternatif dirancang. Ketiga, adopsi kebijakan, yaitu pengesahan oleh otoritas resmi seperti pemerintah atau parlemen. Keempat, implementasi kebijakan, yaitu pelaksanaan oleh lembaga terkait. Kelima, evaluasi kebijakan, yaitu penilaian terhadap efektivitas dan dampak kebijakan tersebut. Dengan memahami kebijakan publik, masyarakat dapat lebih menyadari hak dan kewajiban mereka serta peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan umum.

## 2. Pengertian Evaluasi kebijakan

Evaluasi kebijakan Evaluasi kebijakan bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab kegagalan suatu kebijakan serta menilai apakah kebijakan tersebut telah mencapai dampak yang diharapkan (Amanda, 2020). Oleh sebab itu, evaluasi tidak hanya dilakukan pada tahap akhir, tetapi juga pada setiap tahap proses kebijakan. Proses evaluasi mencakup spesifikasi, pengukuran, analisis, dan penyusunan rekomendasi. Evaluasi merupakan upaya untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan berhasil mencapai tujuannya dengan membandingkan hasil yang dicapai terhadap tujuan dan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan berbagai perspektif di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan adalah proses penilaian terhadap serangkaian tindakan yang telah direncanakan, diputuskan, dan diimplementasikan.

Evaluasi yang berasal dari kata dalam bahasa Inggris "evaluation", dapat diartikan sebagai penilaian dalam bahasa Indonesia. Kata "evaluation" berasal dari kata dasar "value", yang berarti nilai. Menurut William Dun, evaluasi adalah proses untuk menilai (appraisal), memberi nilai (rating), dan mengevaluasi (assessment) segala hal yang berkaitan dengan cara untuk menghasilkan serta menganalisis informasi terkait dengan nilai dan manfaat suatu kebijakan (Warman, Komariyah, dan Kaltsum 2023). Evaluasi adalah proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi untuk menilai sejauh mana tujuan telah tercapai. Untuk menentukan nilai sesuatu, evaluator membandingkannya dengan kriteria yang telah ditetapkan. Evaluator dapat langsung membandingkan hasil dengan kriteria umum atau mengukur objek yang dievaluasi sebelum membandingkannya dengan kriteria tertentu. Dalam konteks lain, evaluasi, pengukuran, dan penilaian merupakan kegiatan yang bersifat hierarkis, di mana pengukuran dan penilaian adalah bagian dari proses evaluasi yang lebih besar.

Menurut Anderson dalam(Ii & Pustaka, 1975) Secara umum, evaluasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses penilaian terhadap kebijakan yang meliputi aspek substansi, pelaksanaan, dan dampak dari kebijakan tersebut. Evaluasi kebijakan berfokus pada penilaian, estimasi, dan taksiran terhadap implementasi (proses) serta dampak (akibat) dari kebijakan. Sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan dilakukan sepanjang seluruh tahapan, bukan hanya pada tahap akhir.

## 3. Teori Evaluasi Menurut Anderson

Evaluasi kebijakan bantuan sosial merupakan tahap penting dalam menilai efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat(Siti Anisatun, 2014). Evaluasi ini mencakup analisis terhadap aspek keadilan dalam distribusi bantuan, keberlanjutan program dalam jangka panjang, serta dampak sosial

dan ekonomi yang dihasilkan. Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan bansos di Kabupaten Jember, khususnya di Kelurahan Slawu, adalah ketidakakuratan data penerima yang menyebabkan distribusi bantuan tidak merata. Di samping itu, kendala anggaran dan kurangnya sumber daya manusia juga menjadi faktor penghambat dalam memastikan program berjalan efektif(MAdani, 2011). Pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga netralitas program bansos selama periode politik, seperti Pilkada, untuk mencegah penyalahgunaan bantuan sebagai alat politik.

Dari sisi dampak, program bansos memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, baik secara sosial maupun ekonomi. Bantuan sosial membantu mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan daya beli, serta meringankan beban finansial keluarga miskin. Namun, tanpa pengelolaan yang baik, bansos berisiko menciptakan masyarakat yang menggantungkan ke bansos. Oleh sebab itu, diperlukan evaluasi yang transparan dan menyeluruh melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif agar kebijakan ini dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Hasil evaluasi yang baik dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan, sehingga program bantuan sosial tidak hanya memberikan dampak jangka pendek, melainkan juga mendorong kemandirian ekonomi penerima bantuan dalam jangka panjang.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai Evaluasi kebijakan bantuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan di Keluarahan Slawu, Kabupaten Jember. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Slawu, Kabupaten Jember. Penelitian ini mengadopsi Model Analisis Interaktif dari Miles dan Huberman, yang memetakan langkah-langkah analisis data ke dalam beberapa fase, yaitu pengumpulan data data collection, penyederhanaan data (data reduction), visualisasi data (data display), dan penyimpulan atau verifikasi (conclusions) (Ajif, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Keadilan

Keadilan dalam bantuan sosial merujuk pada prinsip bahwa distribusi bantuan sosial harus dilakukan secara adil, merata, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berhak menerimanya. Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan sosial diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan, tanpa diskriminasi, dan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip kesetaraan serta keadilan sosial.

1. Kebutuhan yang mendesak

Bantuan sosial harus diprioritaskan bagi individu atau kelompok yang berada dalam kondisi paling rentan, seperti kemiskinan, ketidakmampuan fisik, atau bencana alam. Kebutuhan mendesak dalam bantuan sosial (bansos) di Jember mencakup beberapa aspek yang perlu segera diperbaiki agar program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Salah satu permasalahan utama adalah ketidakakuratan data penerima bansos. Masih banyak keluarga miskin yang seharusnya mendapatkan bantuan tetapi tidak terdaftar, sementara ada penerima yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria tetapi tetap menerima bansos. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dan validasi data secara berkala agar bantuan dapat disalurkan secara lebih adil dan tepat sasaran.

Selain itu, transparansi dan pengawasan dalam distribusi bansos menjadi kebutuhan mendesak untuk mencegah potensi penyalahgunaan dan penyimpangan. Pemerintah harus memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan tanpa adanya intervensi pihak yang berkepentingan. Sistem pengawasan yang lebih ketat, termasuk pelibatan masyarakat dalam pemantauan distribusi bansos, dapat menjadi solusi untuk meningkatkan akuntabilitas program.

Di sisi lain, efisiensi dalam penyaluran bansos juga menjadi perhatian penting. Banyak penerima bansos mengalami keterlambatan dalam pencairan dana atau distribusi bantuan dalam bentuk barang akibat kendala administratif, teknis, maupun faktor politik. Pemerintah perlu mengoptimalkan mekanisme penyaluran dengan sistem yang lebih cepat dan efektif, seperti pemanfaatan teknologi digital dalam pendataan dan penyaluran bantuan. Dengan pembenahan ini, diharapkan program bansos di Jember dapat berjalan lebih optimal dan benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan.

2. Non Diskriminasi

Bantuan sosial harus diberikan tanpa memandang suku, agama, ras, gender, atau status sosial. Semua orang yang memenuhi kriteria berhak menerima bantuan. Non-diskriminasi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) di Jember menjadi prinsip penting untuk memastikan bahwa seluruh warga yang memenuhi kriteria dapat menerima bantuan tanpa adanya perbedaan perlakuan berdasarkan faktor seperti suku, agama, status sosial, atau afiliasi politik. Pemerintah Kabupaten Jember berupaya menerapkan kebijakan distribusi bansos yang adil dan merata, sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam praktiknya, masih ditemukan beberapa tantangan yang dapat menghambat prinsip non-diskriminasi. Salah satunya adalah ketidakakuratan dalam pendataan penerima bantuan, di mana masih ada kelompok masyarakat miskin yang belum terdaftar sebagai penerima bansos. Selain itu, terkadang muncul dugaan bahwa bantuan sosial digunakan sebagai alat politik dalam momentum tertentu, seperti menjelang pemilihan kepala daerah. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah terus melakukan perbaikan dengan meningkatkan transparansi dalam verifikasi data penerima dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan lembaga independen, dalam pengawasan distribusi bansos.

Penerapan non-diskriminasi dalam bansos di Jember juga dilakukan dengan memastikan bahwa kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, dan ibu rumah tangga miskin, mendapatkan perhatian khusus dalam penyaluran bantuan. Program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) didesain agar dapat menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Dengan adanya upaya perbaikan data, pengawasan yang lebih ketat, serta peningkatan sosialisasi, diharapkan prinsip non-diskriminasi dalam bansos di Jember dapat terwujud secara lebih optimal, sehingga bantuan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

3. Kesetaraan

Bantuan sosial harus didistribusikan secara merata, dengan memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan atau diistimewakan secara tidak adil. Kesetaraan dalam bantuan sosial (bansos) di Jember berarti bahwa setiap warga yang memenuhi syarat berhak mendapatkan bantuan tanpa ada perbedaan perlakuan berdasarkan faktor ekonomi, sosial, gender, maupun latar belakang lainnya. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa bansos dapat menjangkau seluruh kelompok masyarakat miskin dan rentan secara adil, sehingga tidak ada pihak yang diabaikan dalam proses distribusi.

Pemerintah Kabupaten Jember berusaha menerapkan kebijakan bansos yang inklusif dengan memperhatikan kelompok yang paling membutuhkan, seperti masyarakat berpenghasilan rendah, lansia, penyandang disabilitas, ibu rumah tangga miskin, dan anak-anak dari keluarga prasejahtera. Program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dirancang untuk memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok ini agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan.

Dalam praktiknya, masih terdapat kendala yang dapat menghambat prinsip kesetaraan, seperti ketidakmerataan akses terhadap informasi bansos, keterlambatan distribusi, serta pendataan penerima yang belum sepenuhnya akurat. Beberapa kelompok masyarakat, terutama yang tinggal di daerah terpencil atau kurang memiliki akses teknologi, sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi tentang

prosedur pendaftaran dan pencairan bansos. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Jember terus melakukan pembaruan dan verifikasi data penerima secara berkala, meningkatkan transparansi dalam penyaluran bantuan, serta mengoptimalkan sistem digital untuk mempercepat proses distribusi bansos.

Dengan perbaikan sistem pendataan, pengawasan yang lebih ketat, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, diharapkan prinsip kesetaraan dalam bansos di Jember dapat terwujud secara lebih baik. Hal ini akan memastikan bahwa setiap warga yang membutuhkan mendapatkan haknya secara adil, sehingga program bansos benar-benar berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

**B. Keberlanjutan**

Keberlanjutan dalam program bantuan sosial (bansos) adalah konsep yang merujuk pada kemampuan program tersebut untuk memberikan manfaat jangka panjang kepada penerima, sekaligus memastikan bahwa program tersebut dapat dipertahankan secara finansial, sosial, lingkungan, dan kelembagaan. Keberlanjutan bansos tidak hanya tentang memberikan bantuan sesaat, tetapi juga tentang menciptakan sistem yang memungkinkan masyarakat menjadi mandiri dan terhindar dari ketergantungan jangka panjang terhadap bantuan.

1. Pemberdayaan masyarakat melalui aspek keberlanjutan bansos

Upaya untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) secara jangka panjang. Tujuannya adalah agar masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan sementara, tetapi mampu mengelola sumber daya dan peluang secara mandiri. Keberlanjutan dalam konteks ini berarti program bansos dirancang untuk menciptakan dampak yang terus-menerus dan berkelanjutan, bahkan setelah bantuan langsung berakhir.

Pemberdayaan masyarakat melalui keberlanjutan bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Jember melibatkan peran aktif Dinas Sosial dalam mengelola program-program yang tidak hanya memberikan bantuan langsung, tetapi juga meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dinas Sosial Kabupaten Jember menyediakan berbagai bentuk bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), yang bertujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu. Selain itu, program rehabilitasi sosial ditujukan bagi individu atau kelompok rentan, seperti gelandangan, pengemis, lansia terlantar, dan anak jalanan, agar mereka dapat kembali berfungsi secara sosial dan mandiri. Tidak hanya itu, Dinas Sosial juga melaksanakan program pemberdayaan guna meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat agar mereka mampu meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.

Untuk memastikan keberlanjutan bantuan sosial, Dinas Sosial Kabupaten Jember menerapkan beberapa strategi, seperti pendampingan dan monitoring secara rutin guna memastikan program pemberdayaan berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, organisasi sosial, dan masyarakat, dilakukan untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan program sosial. Dinas Sosial juga berperan sebagai fasilitator dan mediator antara masyarakat dan program bantuan, sehingga dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan program serta memastikan bantuan tepat sasaran. Melalui peran dan strategi tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Jember berupaya menjadikan program bantuan sosial sebagai alat pemberdayaan yang berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat mencapai kemandirian dan kesejahteraan yang lebih baik.

2. Ketersediaan dana jangka panjang dalam bansos

Adanya alokasi sumber daya keuangan yang stabil dan berkelanjutan untuk mendukung pelaksanaan program bantuan sosial (bansos) dalam periode waktu yang panjang. Dana jangka panjang ini diperlukan untuk memastikan bahwa program bansos tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat terus berjalan dan memberikan manfaat secara konsisten kepada masyarakat penerima, bahkan setelah program awal selesai.

Tanpa ketersediaan dana jangka panjang, program bansos berisiko terhenti di tengah jalan, sehingga tidak mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat secara maksimal.

Ketersediaan dana jangka panjang dalam bantuan sosial (bansos) merupakan faktor penting untuk memastikan program ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang konsisten bagi masyarakat yang membutuhkan. Sumber pendanaan bansos umumnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta kontribusi dari pihak swasta atau organisasi sosial. Untuk menjaga kesinambungan dana, pemerintah menerapkan strategi perencanaan anggaran yang matang, memastikan alokasi dana setiap tahun tetap tersedia sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, diversifikasi sumber pendanaan juga menjadi kunci dalam menjamin ketersediaan dana jangka panjang. Pemerintah dapat menggandeng sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) atau kerja sama dengan organisasi non-pemerintah (NGO) untuk mendapatkan tambahan dana. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel juga menjadi aspek penting dalam menjaga keberlanjutan bansos, dengan menerapkan sistem pengawasan dan audit berkala agar dana yang dialokasikan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.

Lebih lanjut, pemerintah juga berupaya meningkatkan efektivitas program bansos dengan mendorong program pemberdayaan ekonomi bagi penerima bantuan. Dengan memberikan pelatihan keterampilan dan akses ke modal usaha, penerima bansos dapat beralih dari ketergantungan terhadap bantuan menjadi individu yang mandiri secara finansial. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi beban anggaran dalam jangka panjang tetapi juga menciptakan siklus ekonomi yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat.

3. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan

Dalam konteks keberlanjutan program bantuan sosial (bansos) merujuk pada proses di mana masyarakat, terutama penerima bansos dan kelompok terkait, dilibatkan secara aktif dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Keterlibatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa program bansos dirancang sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan aspirasi masyarakat, sehingga lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Dengan melibatkan masyarakat, program bansos tidak hanya menjadi inisiatif top-down dari pemerintah, tetapi juga mencerminkan partisipasi aktif dari mereka yang menjadi sasaran program. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan bansos mencakup beberapa tahap, mulai dari identifikasi kebutuhan, di mana masyarakat dilibatkan untuk mengungkapkan masalah dan kebutuhan mereka, hingga pengambilan keputusan, di mana mereka memberikan masukan tentang desain program, kriteria penerima, dan mekanisme distribusi.

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Jember merupakan aspek penting untuk memastikan program yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Partisipasi aktif masyarakat dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas program bansos. Masyarakat berperan dalam mengidentifikasi permasalahan sosial yang ada di lingkungan mereka, sehingga program bansos dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik komunitas. Selain itu, melalui forum musyawarah desa atau kelurahan, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan usulan terkait program bansos, yang kemudian dipertimbangkan dalam perencanaan oleh pemerintah daerah. Tidak hanya dalam tahap perencanaan, masyarakat juga dapat terlibat dalam pengawasan dan evaluasi program bansos, memastikan bantuan tepat sasaran serta memberikan masukan untuk perbaikan program di masa mendatang.

Untuk mendorong partisipasi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Jember melakukan berbagai upaya, seperti sosialisasi program bansos dan pengembangan kapasitas masyarakat. Salah satu contohnya adalah kerja sama dengan Kementerian Sosial dalam mengadakan sosialisasi aplikasi Cek Bansos di Kecamatan Sumbersari. Aplikasi ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penyaluran bantuan sosial serta mendorong transparansi dalam proses penyaluran. Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat guna meningkatkan kemampuan mereka dalam

berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan pengawasan program bansos. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap program bansos, diharapkan bantuan yang diberikan dapat lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

**C. Dampak Sosial dan Ekonomi**

Bantuan sosial (bansos) adalah program yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga tertentu kepada masyarakat, terutama kelompok rentan atau berpenghasilan rendah, untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan. Dampak sosial dan ekonomi bansos merujuk pada pengaruh atau akibat yang timbul dari pelaksanaan program bansos terhadap kehidupan sosial dan kondisi ekonomi masyarakat.

1. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial

Pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial dilakukan dengan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin dan rentan. Bansos bisa berupa uang tunai, sembako, subsidi, atau program lain yang membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dalam upaya mengurangi kemiskinan, bansos berperan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan, serta memberikan modal atau pelatihan kerja agar mereka bisa mandiri secara ekonomi. Selain itu, bansos juga mencegah kelompok rentan jatuh lebih dalam ke dalam kemiskinan, terutama saat krisis ekonomi atau bencana.

Sementara itu, dalam mengurangi kesenjangan sosial, bansos membantu meningkatkan kesejahteraan kelompok bawah agar tidak terlalu jauh tertinggal dari kelompok atas. Program ini juga memberikan akses yang lebih merata terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta mengurangi ketimpangan ekonomi antar daerah dengan menyesuaikan jenis bantuan sesuai kebutuhan wilayah. Namun, bansos harus dikelola dengan baik agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Jika terjadi penyimpangan, justru bisa memperparah kesenjangan sosial. Oleh karena itu, transparansi dan pengawasan dalam penyaluran bansos sangat penting agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh mereka yang membutuhkan.

2. Potensi Inflasi

Pemberian bantuan sosial (bansos) memang bisa berdampak pada inflasi jika tidak dikelola dengan baik. Ketika bansos berupa uang tunai diberikan dalam jumlah besar, daya beli masyarakat meningkat, sehingga permintaan barang dan jasa juga naik. Jika suplai barang dan jasa tidak bisa mengimbangi lonjakan permintaan tersebut, harga-harga bisa naik, menyebabkan inflasi. Selain itu, bansos dalam bentuk subsidi atau bantuan pangan juga bisa memengaruhi harga pasar. Misalnya, jika distribusi bansos tidak merata atau terjadi penimbunan oleh oknum tertentu, harga barang bisa melonjak karena kelangkaan di pasaran. Di sisi lain, jika bansos berupa barang diberikan dalam jumlah besar tanpa perhitungan yang matang, bisa terjadi kelebihan pasokan yang justru menekan harga dan merugikan produsen kecil, seperti petani dan UMKM.

Untuk menghindari dampak negatif ini, pemerintah biasanya mengontrol jumlah dan mekanisme distribusi bansos agar tetap seimbang dengan kondisi pasar. Koordinasi yang baik antara kebijakan bansos dan stabilisasi harga sangat penting supaya bantuan yang diberikan benar-benar membantu masyarakat tanpa memicu inflasi yang merugikan.

3. Ketergantungan pada bantuan sosial

Ketergantungan pada bantuan sosial (bansos) bisa terjadi jika masyarakat terlalu bergantung pada bantuan tanpa ada upaya untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Hal ini bisa berdampak negatif dalam jangka panjang, karena bansos yang seharusnya bersifat sementara malah menjadi solusi permanen bagi sebagian orang. Jika terus terjadi, bisa menghambat produktivitas dan mengurangi motivasi masyarakat untuk bekerja atau berusaha sendiri.

Selain itu, ketergantungan yang berlebihan juga bisa membebani keuangan negara, terutama jika anggaran bansos terus meningkat tanpa diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang baik. Jika terlalu banyak masyarakat yang menggantungkan hidup pada bansos, maka beban fiskal pemerintah semakin berat, dan bisa mengurangi alokasi dana untuk sektor lain seperti pendidikan, infrastruktur, atau kesehatan.

Untuk mengatasi ketergantungan ini, bansos harus didesain dengan pendekatan yang lebih berkelanjutan, misalnya dengan program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, atau bantuan modal usaha. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih mandiri secara finansial dan tidak terus-menerus bergantung pada bantuan. Bansos seharusnya menjadi jaring pengaman sosial sementara, bukan solusi utama untuk mengatasi kemiskinan dalam jangka panjang.

## PENUTUP
## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Evaluasi kebijakan bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan slawu, Kabupaten Jember dapat diterapkan dengan menggunakan Teori Anderson dengan menggunakan beberapa dimensi diantaranya

**Keadilan**: Keadilan dalam bansos mengacu pada prinsip distribusi yang adil dan merata, sehingga bantuan dapat diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.

**Keberlanjutan**: Keberlanjutan dalam bansos mengacu pada kemampuan program untuk memberikan manfaat jangka panjang dan tidak hanya bersifat sementara.

**Damdpak ekonomi dan sosial**: bansos memiliki potensi untuk menciptakan dampak positif maupun negatif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Dengan menerapkan beberapa dimensi tersebut evaluasi kebijakan bantuan sosial dapat lebih efektif sehingga dapat memengaruhi kualitas kesejahteraan masyarakat.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan dan diperbaiki dalam penelitian selanjutnya. Salah satu kekurangan utama adalah kurangnya sistem monitoring dan evaluasi (monev) yang kuat dalam implementasi program bantuan sosial (bansos), sehingga efektivitasnya masih belum optimal. Meskipun bantuan sosial telah disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, masih ditemukan beberapa kendala dalam distribusi dan pendataan penerima bantuan. Salah satunya adalah adanya ketidaksesuaian data penerima dengan kondisi riil di lapangan, yang menyebabkan bantuan tidak sepenuhnya tepat sasaran. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program bansos masih terbatas, yang berpotensi mengurangi efektivitas dan akuntabilitas program tersebut. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih mendalami mekanisme evaluasi kebijakan bansos, khususnya dalam hal transparansi, efektivitas, dan dampak jangka panjangnya terhadap kesejahteraan masyarakat penerima.

Objek penelitian selanjutnya, disarankan agar fokus penelitian tidak hanya terbatas pada kebijakan bansos yang sudah ada, tetapi juga mencakup inovasi dalam sistem penyaluran bansos, terutama dalam era digitalisasi. Dengan semakin berkembangnya teknologi, digitalisasi dalam penyaluran bansos dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi program. Oleh karena itu, penelitian ke depan dapat mengkaji implementasi sistem digital dalam penyaluran bansos, seperti penggunaan aplikasi berbasis data yang memungkinkan verifikasi penerima bantuan secara real-time, serta dampaknya terhadap efektivitas dan efisiensi program. Selain itu, penelitian juga dapat mengkaji peran berbagai aktor dalam implementasi bansos, seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta peran masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program bansos agar lebih transparan dan tepat sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA

Ajif, P. (2013). Pola Jaringan Sosial pada Industri Kecil Rambut Palsu di Desa Karangbanjar, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Penelitian*, 31–40. https://eprints.uny.ac.id/18100/5/BAB III 09.10.033 Aji p.pdf

Amanda, I. P. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, *1*(1), 33–37. http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index

Bethesda, S., AB, T., & Sri, M. (2014). Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN*, *1*(2), 1–21. https://www.neliti.com/publications/9581/implementasi-kebijakan-penyaluran-hibah-dan-bantuan-sosial-kemasyarakatan-di-kab

Fadhli, K., Himmah, S. R., & Taqiyuddin, A. (2021). Analisis Perubahan Pola Konsumsi Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Pada Masapandemi Covid-19. *Jurnal Education and developmentInstitut Pendidikan Tapanuli Selatan*, *9*(3), 110–117.

I Wayan Tagel Winarta, A. A. G. R. dan I. M. S. (2020). Evaluasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Gianyar. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, *5*(1), 28–42.

Ii, B. A. B., & Pustaka, T. (1975). *131801002_File 5*. 8–51.

MAdani, M. (2011). *Dimensi interaksi aktor dlm BUKU KEBIJAKAN PUBLIK* (hal. 210).

Samsudin. (2022). *bansos rumah sejahtera terpadu bantu penuhi kebutuhan perumahan untuk fakir miskin*. kementrian keuangan RI. https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/4029-bansos-rumah-sejahtera-terpadu-rst-bantu-penuhi-kebutuhan-perumahan-untuk-fakir-miskin.html

Santoso, B., & Rahmawati, A. (2022). *FISIP_JURNAL_Sustainable Social Services Berbasis Aset dalam Meningkatkan Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan*.

Sean Anggiatheda Sitorus. (2024). *pengertian bansos, jenis dan tujuannya*. antara. https://www.antaranews.com/berita/4212894/pengertian-bansos-jenis-dan-tujuannya#google_vignette

Siti Anisatun. (2014). Tinjauan Pustaka Tinjauan Pustaka. *Convention Center Di Kota Tegal*, 9.

Zakiyah, K. (2017). Akuntabilitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan. *Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara*, *1*, 103–105.